

Kebijakan Merdeka Belajar dan Upaya Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Eti Fatiroh¹, Sukhoiri²

¹Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Institut Agama Islam Banten Serang,
e-mail: pipitwulantika@gmail.com

²Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Institut Agama Islam Banten Serang,
e-mail: heriliom@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to discuss the essence of Merdeka Belajar (Independent Learning), the objectives of the Merdeka Belajar policy, and its implications for improving the quality of Islamic Religious Education learning. This research employs a descriptive qualitative method with a literature review approach. The data sources consist of literature studies and documentation related to Merdeka Belajar and learning quality. The data analysis technique used in this study is descriptive analysis. The findings reveal that Merdeka Belajar represents the freedom for educational institutions (schools, teachers, and students) to innovate, act independently, and be creative. The primary goal of Merdeka Belajar is to create a joyful learning environment for teachers, students, and parents. The implementation of Merdeka Belajar to enhance the quality of Islamic Religious Education learning can be achieved through student-centered learning, teacher commitment, curriculum management, and an effective and efficient learning process.

Keywords : Freedom to Learn, Quality of Learning, Islamic Religious Education

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas tentang hakikat merdeka belajar, apa tujuan kebijakan merdeka belajar dan bagaimana implikasi kebijakan merdeka belajar dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi Pustaka. Sumber data berupa telaah literatur dan dokumentasi tentang merdeka belajar dan mutu pembelajaran. Teknik analisis penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa merdeka belajar merupakan kebebasan untuk Pendidikan (sekolah, guru dan murid) dalam berinovasi, mandiri dan kreatif. Tujuan merdeka belajar adalah supaya guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapatkan suasana bahagia dalam lingkungan belajar. Implementasi merdeka belajar dalam upaya peningkatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan dengan menjadikan sistem pembelajaran yang berorientasi pada siswa, komitmen guru, manajemen kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Kata Kunci : Merdeka Belajar, Mutu Pembelajaran, Pendidikan Agama Islam

Corresponding Author : Sukhoiri, Institut Agama Islam Banten Serang, Jl. Ki Fathoni No. 12/51 Pagantungan, Kelurahan Cimuncang, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia, e-mail: heriliom@gmail.com

PENDAHULUAN

Era modern dan global yang ditandai dengan cepatnya kemajuan diberbagai bidang dan tersebarnya informasi kesegala pelosok negeri dengan cepat, mengakibatkan kompetisi di berbagai sektor semakin ketat. Sistem pendidikan saat ini mengalami transformasi signifikan sebagai respons terhadap perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial. Pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas tradisional, tetapi juga melibatkan platform digital, kurikulum yang beragam, dan metode pengajaran yang inovatif. Terdapat konflik antara prinsip-prinsip sekuler yang mendasari sistem pendidikan modern dengan prinsip-prinsip agama Islam dalam hal materi kurikulum, metode pengajaran, dan norma-norma sosial. Misalnya, ada perbedaan pandangan mengenai bagaimana pendidikan agama Islam harus diajarkan di sekolah-sekolah umum, dan sejauh mana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran lain seperti sains dan humaniora (Eryandi, 2023)

Dunia pendidikan juga dituntut untuk lebih agresif dalam menyikapi berbagai perkembangan sebagai konsekuensi dari laju pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk itu setiap lembaga pendidikan dituntut untuk lebih cepat dan tepat dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan siswa yang dibutuhkan oleh dunia modern saat ini (sekolah dan masyarakat khususnya) (Bamalli, 2014). Berbagai perkembangan ini harus sejalan dengan era revolusi Industri 4.0 dan era society 5.0.

Pendidikan dianggap sebagai sarana penting dalam pembentukan identitas keagamaan individu, namun tantangan muncul ketika nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama tidak terintegrasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan. Maka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, salah satu kebijakan sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan adalah membuat kebijakan baru terkait kurikulum. Kurikulum yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah khususnya menteri pendidikan adalah kurikulum merdeka belajar. Konsep kurikulum merdeka belajar ini menekankan pada pemberian kebebasan di bidang Pendidikan (Faiz & Kurniawaty, 2020). Untuk itu, pembangunan disektor pendidikan perlu dirancang agar berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul dapat diatasi. Dunia pendidikan nasional perlu dirancang agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan pada era globalisasi seperti sekarang ini.

Hal tersebut bukan hanya tanggungjawab lembaga pendidikan ditingkat bawah namun juga harus didukung oleh kebijakan dari pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah kementerian pendidikan. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan saat ini menjadi prioritas utama agar menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghadapi globalisasi (Ananda et al., 2023). Secara nasional pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat khususnya dalam upaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan global, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul turut mendukung kemajuan bangsa, terlebih dalam menghadapi era revolusi industri seperti sekarang ini, bangsa Indonesia harus menghadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Menurut pandangan Mulyasa, ada tiga unsur penting yang menentukan mutu dan kualitas suatu lembaga pendidikan. Ketiga unsur yang dimaksud adalah; Manajemen kurikulum, Sumber Daya Manusia lembaga, dan proses pembelajaran. Ketiga unsur sebagaimana disebutkan akan ditentukan oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah/madrasah yang harus mengacu pada kebutuhan dan kemampuan dalam hal meningkatkan mutu. Kebijakan kebijakan juga harus memperhatikan semua unsur kebutuhan mulai dari siswa, guru dan wali murid. Hal ini sesuai yang ungkapkan Mulyasa yang menyatakan bahwa Pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pendapat di atas adalah peningkatan mutu pembelajaran. Hal ini karena pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satu inisiatif yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjawab tantangan ini adalah Kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa dan guru dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), kebijakan ini memiliki relevansi yang sangat penting, mengingat PAI tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter dan akhlak peserta didik.

Kebijakan Merdeka Belajar mendorong adanya inovasi dalam metode pengajaran, penilaian yang lebih beragam, dan pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel. Dengan demikian, pendidik diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan menarik, serta relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Dalam konteks PAI, penerapan kebijakan ini dapat memperkuat pemahaman dan praktik ajaran agama, serta mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kebijakan kurikulum merdeka belajar yang tentu bersinggungan langsung dengan tugas dan fungsi pokok guru dalam proses belajar mengajar (pembelajaran), proses pembelajaran sebagai ujung tombak sistem pendidikan di Indonesia, apakah kebijakan merdeka belajar mampu meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Pendidikan Agama Islam, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi kebijakan tersebut dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan pendidikan yang lebih baik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi yang efektif dalam mengoptimalkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di era Merdeka Belajar, sehingga dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan mampu berkontribusi positif di masyarakat.

KAJIAN TEORI

A. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan atau istilah "*education*" dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin "*Educare*" yang berarti memasukkan sesuatu, mungkin mengacu pada memasukkan ilmu ke dalam pikiran seseorang. Jadi, terdapat tiga elemen yang terlibat di sini: ilmu, proses memasukkan, dan pikiran orang, asalkan ilmu tersebut benar-benar masuk ke dalam pikiran. Pendidikan berfungsi sebagai upaya untuk membina dan mengembangkan kepribadian manusia melalui aspek rohani dan jasmani, yang harus berlangsung secara bertahap (Kaelan, 2018). Dalam pendidikan Islam, terdapat tiga istilah digunakan untuk menggambarkan konsep pendidikan, tiga istilah dimaksud adalah; *Tarbiyah*, *Ta'lim*, dan *Ta'dib*.

Tarbiyah berasal dari tiga pendapat yaitu; *Pertama*, kata "rabba-yarbu" yang berarti bertambah dan tumbuh. *Kedua*, "rabiya-yarba" yang berarti tumbuh dan berkembang. *Ketiga*, "Rabba-Yarubbu" yang berarti memperbaiki menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Kata Tarbiyah dipergunakan untuk pendidikan. Al-Nahwali sebagaimana dikutip oleh Aly yang mengemukakan kesimpulan tentang konsep pendidikan dalam term Tarbiyah, yaitu *Pertama*, pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan, sasaran dan target. *Kedua*, pendidikan yang sebenarnya itu berasal dari Allah, karena dialah yang menciptakan fitrah dan bakat manusia, dialah yang membuat dan memperlakukan hukum-hukum perkembangan serta bagaimana fitrah dan bakat-bakat itu berinteraksi, Dialah pula yang mengariskan syari'at untuk mewujudkan kesempurnaan, kebaikan, dan kebahagiaannya.

Ketiga, pendidikan menghendaki penyusunan langkah- langkah sistematis yang harus dilalui secara bertahap oleh berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran. Empat, pendidikan harus mengikuti hukum-hukum penciptaan dan syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah (Aly, 2019).

Adapun makna ta'lim jauh lebih universal dibandingkan dengan istilah tarbiyah, sebab menurutnya ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum muslimin, Rasulullah SAW tidak terbatas pada membuat mereka dapat membaca, tetapi membaca dengan perenungan, yang berisi pemahaman, tanggung jawab dan amanah. Istilah ini juga diartikan proses pembelajaran secara terus-menerus sejak manusia lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati. "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur." (Q.S. An-Nahl/ 16:78)

Konsep ta'lim (menjadikan seseorang berilmu) mengandung pengertian sebagai "usaha untuk mendorong dan menggerakkan jiwa atau akal seseorang untuk belajar (menuntut ilmu agar sampai pada kesimpulan ide gagasan dan hakekat yang sebenarnya tentang sesuatu. Jadi konsep ta'lim lebih menekankan tentang usaha untuk membelajarkan anak, dari pada hanya sekedar menyampaikan atau menanamkan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya pendidikan juga diartikan kata "*ta'dib*" yang berasal dari kata adab yang berarti moral, etika, dan adab atau kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir dan batin. Kata peradaban (Indonesia) juga berasal dari kata dasar adab, sehingga aktivitas pendidikan merupakan upaya membangun peradaban atau perilaku beradab (*civilization*) yang berkualitas dimasa depan. Istilah *ta'dib* yang berarti pendidikan, pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara berangsur-angsur ditanamkan kedalam jiwa manusia, tentang tempat yang tepat bagi segala sesuatu didalam tatanan wujud sehingga hal ini membimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat didalam tatanan wujud tersebut (Muhaimin, 2016).

Sebagian ahli berpendapat bahwa istilah ta'dib merupakan istilah yang paling tepat untuk menggambarkan konsep pendidikan Islam secara keseluruhan, yang mencakup menanamkan adab, budi pekerti, dan perilaku sopan ke dalam setiap orang muslim. Sementara beberapa ahli lain berpendapat bahwa istilah ta'dib merupakan istilah yang paling tepat untuk menggambarkan konsep pendidikan Islam.

Berbagai makna (term) pendidikan Islam sebagaimana dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam lebih menekankan pada keseimbangan dan keserasian perkembangan hidup sebagai manusia. Pendidikan Islam merupakan usaha dalam mengubah tingkah laku dan karakter individu dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Proses pendidikan merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi manusia yang berawal dari kemampuan-kemampuan dasar, yang dengan proses belajar akan mengalami perubahan dalam pribadinya yang senantiasa berada dalam nilai-nilai Islam yang melahirkan norma syari'at dan akhlakul karimah.

B. Merdeka Belajar

Merdeka belajar adalah kebebasan untuk Pendidikan (sekolah, guru dan murid) dalam berinovasi, mandiri dan kreatif. Terobosan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang merdeka belajar dimaksudkan untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia. Tujuan merdeka belajar adalah agar guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia dalam belajar. Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tapi benar-benar inovasi Pendidikan (Prayogo, 2020)

C. Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Mutu berarti “Karat” baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf/derajat (kepandaian, kecerdasan) (Poerwadarminta, 2012). Mutu diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus menerus sehingga dikenal dengan $Q = Match$ (*Quality = Meets Agreed Terms and Changes*) (Gasperz, 2003). Dalam mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup, *input, proses dan output* pendidikan (Depdiknas RI, 2001). Pengertian mutu lebih spesifik sebagaimana dijelaskan Nanang dalam tulisannya yang menyatakan bahwa mutu adalah kemampuan (*ability*) yang dimiliki suatu jasa yang dapat memenuhi kebutuhan, kepuasan (*satisfaction*), pelanggan (*customers*) dalam pendidikan. Customers dikelompokkan menjadi dua yaitu *internal customer* dan *eksternal customer*. *Internal customer* yaitu siswa dan *customer eksternal* yaitu masyarakat dan dunia industri (Fatah, 2013). mutu tidak bisa berdiri sendiri melainkan perlu adanya hal-hal atau faktor yang dapat membantu dalam pencapaian dan pemeliharannya. Dalam hal ini maka penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) sangat dibutuhkan.

Sementara pendidikan adalah perbuatan mendidik jadi secara etimologi mutu pendidikan adalah kualitas perbuatan mendidik, perbuatan disini adalah interaksi antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar di kelas (Poerwadarminta, 2012). Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan (Bp et al., 2022).

Dengan demikian pendidikan merupakan suatu bimbingan, pengarahan, dan tuntunan yang dilakukan oleh pendidik untuk menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal dan integral, baik aspek jasmani, rohani, aspek sensual logis (ranah kognisi), sensual empiris (ranah psikomotorik), maupun aspek moral-transendental (ranah afektif), baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan kompetensi, baik kompetensi akademik ataupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia yang keseluruhan merupakan kecakapan hidup (*Life Skill*) selain itu menghasilkan manusia yang seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia yang pribadi integral (*integrated personality*) yaitu mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu dan amal (Sudrajat, 2005). Adapun pengertian lembaga pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam, yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam (Bafadhol, 2017). Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam tersebut harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan terlaksananya pendidikan dengan baik, menurut tugas yang diberikan kepadanya, seperti sekolah (madrasah) yang melaksanakan proses pendidikan Islam agar mutu pendidikan Islam terus lebih baik. Maka menurut penulis mutu pendidikan adalah kualitas penyelenggaraan pendidikan yang meliputi : kesiapan siswa, ketersediaan tenaga pengajar, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, relevansi pendidikan dengan kebutuhan, suasana lingkungan dan iklim sekolah. Mutu pendidikan yang dimaksud disini adalah kemampuan lembaga pendidikan Islam

dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.

Menurut pandangan Mulyasa, ada tiga unsur penting yang menentukan mutu dan kualitas suatu lembaga pendidikan. Ketiga unsur yang dimaksud adalah; Manajemen kurikulum, Sumber Daya Manusia lembaga, dan proses pembelajaran. Ketiga unsur sebagaimana disebutkan akan ditentukan oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah/madrasah yang harus mengacu pada kebutuhan dan kemampuan dalam hal meningkatkan mutu. Kebijakan-kebijakan juga harus memperhatikan semua unsur kebutuhan mulai dari siswa, guru dan wali murid. Hal ini sesuai yang ungkapkan Mulyasa yang menyatakan bahwa Pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan) (Mulyasa, 2003). Dari tiga unsur penentu mutu belajar sebagaimana yang dijelaskan oleh Mulyasa di atas, tulisan ini hanya akan berfokus pada unsur proses pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan dasar teori di manfaatkan sebagai pemandu juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Afrizal, 2016). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang (Afandi et al., 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Jenis metode deskriptif yang dilakukan yaitu penelitian perpustakaan (*library research*) yang merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan baik berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian (Zed, 2008). Penelitian perpustakaan berarti sumber data diambil dari berbagai sumber data yang relevan dengan topik yang diangkat yaitu merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu Pembelajaran khusus Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sumber data diperoleh dari dokumen seperti buku, jurnal, dan artikel-artikel online di berbagai media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Kebijakan merdeka belajar sebagaimana dicanangkan pemerintah mempunyai 4 kebijakan merdeka belajar yakni; penyelenggaraan Ujian Berbasis Nasional (USBN) diganti ujian (*assesmen*) yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing, penggantian UN (Ujian Nasional) sebagai indikator kelulusan dan keberhasilan peserta didik menjadi *asesmen* Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, guru diberi kebebasan dalam mengembangkan format RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan peraturan tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sebelumnya zonasi menjadi lebih fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kondisi di daerah. Hal ini juga disampaikan Unifah (Rosyidi & PGRI, 2020) dalam pemaparan seminar Nasional bertajuk Merdeka Belajar; Aplikasinya dalam Manajemen Pendidikan & Pembelajaran di Sekolah, menyampaikan 4 Kebijakan Pendidikan Nasional "MERDEKA BELAJAR"

NO	KEBIJAKAN	DESKRIPSI
1	USBN menjadi asesmen oleh sekolah	menilai kompetensi siswa, melalui tes tertulis dan bentuk penilaian lain yang komprehensif. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN dialihkan untuk pengembangan kapasitas guru dan sekolah.
2	UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum & Survei Karakter	tidak mengukur penguasaan materi mapel dalam kurikulum seperti yang diukur melalui UN selama ini. UN ke depan dilakukan untuk pemetaan kompetensi minimum literasi & numerasi siswa, dan memperkuat aplikasi pembelajaran yang diukur oleh PISA dan TIMSS. Dilakukan di tengah jenjang sekolah (kelas 4, 8, 11).
3	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	Guru bebas memilih, membuat, mengembangkan, dan menggunakan format RPP atas prakarsa dan inovasi sendiri. RPP dipersingkat yang berisi tujuan, kegiatan dan asesmen pembelajaran. Penulisan RPP efisien dan efektif agar guru punya waktu untuk menyiapkan dan evaluasi proses pembelajaran secara terarah
4	Sistem Zonasi PPDB dilaksanakan secara fleksibel	mengatasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Ada standar PPDB antar-daerah, yaitu: jalur zonasi menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi atau sisa 0-30%, sesuai dengan kondisi daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Beberapa implikasi dari kebijakan merdeka belajar sebagaimana dalam tabel di atas dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan diantaranya:

1. Pembelajaran yang berorientasi pada siswa

Pembelajaran harus menghasilkan belajar pada peserta didik dan harus dilakukan suatu perencanaan yang sistematis, sedangkan mengajar hanya salah satu penerapan strategi pembelajaran diantara strategi-strategi pembelajaran yang lain dengan tujuan utamanya menyampaikan informasi kepada peserta didik (Siregar & Nara, 2010). Kalau diperhatikan, perbedaan kedua istilah ini bukanlah hal yang sepele, tetapi telah menggeser paradigma pendidikan, pendidikan yang semula lebih berorientasi pada “mengajar” (guru yang lebih banyak berperan) telah berpindah kepada konsep “pembelajaran” (merencanakan kegiatan-kegiatan yang orientasinya kepada siswa agar terjadi belajar dalam dirinya). Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh pihak peserta didik atau murid. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas peserta didik yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran.

2. Komitmen Guru

Komitmen guru adalah keterikatan emosional seorang guru dengan sekolah dimana ia bekerja sehingga ia bersedia bertahan, mengidentifikasi diri dan terlibat untuk mencapai tujuan sekolah. Terdapat beberapa jenis komitmen yang terkait dengan guru yaitu: komitmen profesi, komitmen pada anak didik dan komitmen pada masyarakat (Hussen et al., 2016) Guru yang berkomitmen mengembangkan pengetahuan, sikap yang diinginkan dan keterampilan yang dibutuhkan (Jane .J.S, 2019). Sebagian guru di Indonesia melihat komitmen mereka sebagai bagian dari identitas profesional mereka sehingga mereka mendapatkan banyak kenikmatan dari komitmen tersebut, namun tidak sedikit guru menganggap bahwa komitmen sebagai guru membutuhkan investasi pribadi yang besar dan melihatnya sebagai pekerjaan yang berat sehingga merasakan berat dalam menjalani komitmen tersebut.

3. Manajemen Kurikulum

Kurikulum adalah rencana program pengajaran atau Pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ibaratkan orang yang akan membangun rumah, kurikulum adalah *blue print* (gambar cetak birunya).

Kurikulum atau program pendidikan inilah sebenarnya ditawarkan atau dijual oleh suatu lembaga pendidikan kepada masyarakat. Menurut Azhari (Azhari, 2017) ruang lingkup manajemen kurikulum terdiri dari beberapa bagian, yaitu: a) manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum; b) manajemen pelaksanaan kurikulum; c) supervisi pelaksanaan kurikulum; d) pemantauan dan penilaian kurikulum; e) perbaikan kurikulum; f) desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum; g) masalah. aktivitas manajemen kurikulum ini merupakan kolaborasi antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah beserta peran guru dalam melakukan kegiatan manajerial agar perencanaan berlangsung dengan baik. Dari definisi manajemen kurikulum di atas, dapat dipahami bahwa manajemen kurikulum merupakan sebuah proses kerjasama dalam mengelola kurikulum untuk mencapai tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan secara efisien dan efektif ketenagaan dalam pengembangan kurikulum serta model-model kepemimpinan yang serasi pada konteks masyarakat yang berkembang dinamis dewasa ini.

B. Merdeka Belajar Dan Upaya Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Peningkatan pembelajaran di suatu sekolah/madrasah harus dilakukan secara konsisten, terencana dan memiliki target yang jelas yang akan dicapai. Pencapaian mutu secara total dan berkesinambungan serta melibatkan semua unsur secara terpadu ini dikenal dengan istilah *total quality management* (TQM).

Total Quality Management merupakan budaya peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus, fokus pada *stakeholder* sekolah demi kepuasan jangka panjangnya dan partisipasi warga sekolah, keluarga, masyarakat dan pemerintah (Asmuni, 2013). Maka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan harus ada beberapa unsur dalam penerapannya dalam lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah, unsur-unsur yang dimaksud adalah:

1. Pendidikan harus merupakan usaha sadar yang harus dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa atau siapa saja yang bertanggung jawab dalam rangka membimbing dan mempersiapkan anak dengan atas nama Allah SWT serta bertanggung jawab kepadanya
2. Bahwa yang dibimbing merupakan generasi muda dengan seluruh kelengkapan dasar dan potensi-potensi fitrahnya agar tumbuh kembang secara bertahap, yaitu kekhalfahan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah SWT
3. Berpedoman kepada Al Qur'an, sehingga secara konseptual dan praktis, maka metode, pelaksanaan, materi, evaluasi dan alat-alatnya dapat dijabarkan dan dikembangkan dari Al Qur'an (Zulkarnain, 2018)

Tercapainya mutu pembelajaran merupakan unsur penting dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas lembaga pendidikan. Maka untuk menentukan dan menjamin mutu pendidikan secara nasional, maka pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengklarifikasi 8 standar mutu yang selanjutnya akan dilakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program satuan pendidikan. Ke delapan standar-standar nasional itu adalah:

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kompetensi merupakan seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
2. Standar Isi, Standar isi yaitu kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Standar Proses, Standar proses yaitu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan

4. Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, Standar Pendidik dan Kependidikan yaitu kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar Sarana dan Prasarana, Standar sarana dan prasarana yaitu kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, perpustakaan, labolatorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan dalam satu tahun.
7. Standar Pengelolaan, Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/ kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
8. Standar Penilaian, Standar Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik (Indonesia, 2021).

Delapan standar nasional pada akhirnya akan bermuara pada suatu tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kedelapan unsur ini diterapkan dalam lembaga pendidikan baik disekolah umum maupun di Madrasah.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Tercapainya Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Faktor pendukung tercapainya mutu pendidikan dalam sebuah madrasah akan sangat ditentukan beberapa faktor, diantaranya tujuan yang akan dicapai, konsistensi pemegang kebijakan, kerjasama semua pihak, manajemen madrasah dan lain sebagainya. Hal ini pulalah yang diungkapkan Nanang Fatah yang menyatakan bahwa grand desain mutu pendidikan akan ditentukan oleh: Kepemimpinan yang visioner (*Visionary Leadership*), Pembelajaran berfokus pada pendidikan (*Learning Centered Education*), Pembelajaran perorangan dan organisasi (*Organizational and Personal Learning*), Menghargai tenaga pendidik, staf dan mitra kerja (*Valuing Faculty, staff dan Partners*), Kegesitan (*Agility*), Fokus pada masa depan, Mengelola inovasi, Manajemen berdasarkan fakta, Pertanggungjawaban sosial dan Persepektif keislaman (Fatah, 2013).

Selain adanya pendukung dalam meningkatkan mutu, maka juga terdapat beberapa faktor yang akan menjadi hambatan tercapainya mutu pendidikan madrasah, sebagaimana diungkapkan Maslikhah yang mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan mutu lembaga pendidikan tidak tercapai, yaitu :

1. Fungsi dan tujuan pendidikan yang kurang melekat pada pelaksana dan pelaksanaan pendidikan
2. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif tidak dijadikan prinsip yang menjunjung tinggi
3. Masyarakat seringkali diberlakukan sebagai komunitas untuk melegalkan sebuah kebijakan pelaksana pendidikan, dan bukan sebagai pelaku untuk memberdayakan madrasah
4. Evaluasi pendidikan sering dibelokkan dengan kepentingan tertentu (Maslikhah, 2017).

Tantangan pendidikan Islam pada era globalisasi seperti saat ini menurut Khaeruddin dalam Nur Hidayat (Hidayat, 2010) adalah sebagai berikut;

1. Untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan.
2. Tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat, dari masyarakat tradisional agraris ke masyarakat

modern industri dan informasi komunikasi, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan SDM.

3. Tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Tantangan terhadap munculnya invansi dan kolonialisme baru di bidang lptek, yang menggantikan invansi dan kolonialisme dibidang politik dan ekonomi.

Semua tantangan tersebut menuntut adanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing di bidang tersebut secara menyeluruh yang berwawasan unggulan, keahlian profesional, berpandangan jauh kedepan, rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi serta memiliki ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan daya tawar pasar.⁸ Kemampuan-kemampuan tersebut seharusnya dapat diwujudkan dalam proses pendidikan Islam di Madrasah yang berkualitas, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, unggul, dan profesional, yang akhirnya nanti dapat menjadi teladan yang dicita-citakan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dari semua pembahasan dari berbagai aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merdeka belajar hakikatnya memberikan solusi dalam meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia, baik dari aspek pembelajaran, guru maupun kurikulum. Keberadaan merdeka belajar memberikan terobosan baru dalam melakukan inovasi pembelajaran yang lebih bermutu serta adaptif terhadap perubahan menjadikan Lembaga Pendidikan di Indonesia lebih maju dan bermutu.

PENUTUP

Merdeka belajar adalah kebebasan untuk Pendidikan (sekolah, guru dan murid) dalam berinovasi, mandiri dan kreatif. Tujuan merdeka belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana bahagia dalam belajar. Untuk mencapai mutu pendidikan diperlukan peningkatan kualitas dalam beberapa unsur pendidikan yaitu Manajemen kurikulum, Sumber Daya Manusia lembaga, dan proses pembelajaran. Kebijakan merdeka belajar dalam unsur proses pembelajaran dapat diterapkan dengan pembelajaran berorientasi pada siswa (*student center learning*) yang diterapkan melalui strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi dan inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., Chamalah, E., & Wardani, O. P. (2013). *Model dan Metode Pembelajaran di Sekolah*. Unissula Press.
- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Aly, H. N. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Ananda, R., Wibisono, W. C., Kisvanolla, A., & Purwita, P. A. (2023). KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.30601/dedikasi.v7i2.4028>
- Asmuni, A. (2013). KONSEP MUTU DAN TOTAL QUALITY MANAJEMEN (TQM) DALAM DUNIA PENDIDIKAN. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(01), Article 01. <https://doi.org/10.19109/td.v18i01.37>
- Azhari, M. (2017). MANAJEMEN KURIKULUM DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (Studi Kasus Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Stabat). *Journal Analytica Islamica*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.30829/jai.v6i2.1277>
- Bafadhol, I. (2017). LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(11), Article 11. <https://doi.org/10.30868/ei.v6i11.95>
- Bamalli, H. S. (2014). Competencies and Strategies for the Teaching of 21st Century Learners in Vocational Home Economics Education. *Journal of Educational and Social Research*, 3(9), Article 9.
- Bp, A. R., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani, Y. (2022). PENGERTIAN PENDIDIKAN, ILMU PENDIDIKAN DAN UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN. *AL-URWATUL WUTSQA: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), Article 1.
- Depdiknas RI. (2001). *Manajemen Penjaminan mutu berbasis Madrasah, Buku I Konsep dan Pelaksana*. Depdiknas RI.
- Eryandi, E. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pendidikan Karakter di Era Digital. *Kaipi: Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.62070/kaipi.v1i1.27>
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). KONSEP MERDEKA BELAJAR PENDIDIKAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PROGRESIVISME. *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v12i2.973>
- Fatah, N. (2013). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Gasperz, V. (2003). *Total Quality Manajemen*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, N. (2010). Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam Tentang Madrasah dan Tantangan Global. *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/al-bidayah.v2i1.8984>
- Hussen, A. A., Teshome, T. Z., & Tegegn, S. A. (2016). Teachers professional commitment towards students learning, their profession and the community in eastern Ethiopian secondary schools. *Journal of Teacher Education and Educators*, 5(3), 289–314.
- Indonesia, P. P. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>
- Jane J.S, A. M. (2019). *School Environment ,Teacher Commitment and Student Achievement in Chemistry at Higher Secondary Level*. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1805>
- Kaelan. (2018). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.

- Maslikhah. (2017). *Pendidikan Multikultural, Rekontruksi Pendidikan berbasis Kebangsaan*. STAIN Salatiga.
- Muhaimin. (2016). *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Rajawali Press.
- Mulyasa. (2003). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam konteks Mensukseskan MBS dan KBK*. Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2012). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prayogo, Y. (2020, Mei). *Peluang Reformasi Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19, Begini Kata Mendikbud* – <https://www.kalderanews.com>.
<https://www.kalderanews.com/2020/05/07/peluang-reformasi-pendidikan-di-tengah-pandemi-covid-19-begini-kata-mendikbud/>
- Rosyidi, U., & PGRI, K. (2020). *Merdeka Belajar: Aplikasinya Dalam Manajemen Pendidikan & Pembelajaran di Sekolah. Modul Seminar Nasional “Merdeka Belajar: Dalam Mencapai Indonesia Maju, 2045.* <https://pps.unj.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Merdeka-Belajar-UNJ-proses.pdf>
- Siregar, E., & Nara, H. (2010). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Ghalia Indonesia.
- Sudrajat, H. (2005). *Manajemen Peningkatan Mutu berbasis sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Implementasi KBK* (. Cipta Lekas Grafika.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkarnain. (2018). *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar.